



Pemkot Migrasikan Jamkesda ke BPJS

YOGYA, TRIBUN - BPJS Kesehatan bersama Pemkot Yogyakarta menarget tahun 2019 seluruh warga Kota Yogyakarta menjadi peserta BPJS dan terintegrasi dengan Jamkesda Kota Yogyakarta.

Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama mengenai Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Kesepakatan merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Wakil Wali Kota Yogyakarta Her-

LAYANAN BPJS KESEHATAN DI

- 188 Fasilitas Tingkat Pertama
- 34 Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjutan
- 22 Apotek
- 12 Optik

oe Poerwadi mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan JKN bagi warga Kota Yogyakarta. Sudah waktunya jaminan kesehatan daerah bermigrasi ke BPJS.

"Kita sekarang ini mulai proses memindahkan semua apa yang menjadi jaminan kesehatan daerah untuk berpindah ke BPJS," ujar Heroe.

Hingga Oktober 2017, jumlah peserta JKN-KIS di Kota Yogyakarta sudah mencapai 390.417 orang atau 95,16 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemkot berkomitmen hingga tahun ini mencapai 96 persen kepesertaan BPJS dan tahun 2019 mencapai 100 persen.

● ke halaman 14

Pemkot Migrasikan Jamkesda

● Sambungan Hal 13

"Jamkesda kan sudah memberikan keseluruhan, ke depannya memperoleh pelayanan dan jaminan yang sama, terutama dengan BPJS," ungkap Heroe.

Ia menjelaskan, penandatanganan kesepakatan merupakan langkah dalam menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui jaminan kesehatan, menjadikan warga merasa aman, dan tidak lagi berpikir ketika terjadi apa-apa dengan kesehatan, tidak pusing memikirkan biaya.

"Jadi nanti masyarakat itu tidak mikir lagi biaya rumah sakit kalau sedang sakit atau ada apa-apa," tuturnya.

Heroe berharap nantinya melalui UHC, layanan JKN-KIS tidak hanya terfokus dalam pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif saja, namun juga layanan yang bersifat promotif dan preventif.

Dari sisi pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta sudah bekerja sama dengan 188 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, 34 Fasilitas Kesehatan Ru-

jukan Tingkat Lanjutan, 22 Apotek, dan 12 Optik di seluruh wilayah kerja BPJS KC Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 56 fasilitas kesehatan Tingkat Pertama, dan 14 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

Target Seluruh WNI
 Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, mengapresiasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS. Menurutnya, ini merupakan wujud keataatan pada undang-undang.

"Seluruh Jamkesda diwajibkan terintegrasi, paling lambat pada 1 Januari 2019 semua warga negara Indonesia sudah tercover BPJS Kesehatan. Sehingga kerjasama ini memperkuat sinergi dan komitmen dalam memberikan jaminan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Andayani.

Ia menyebut, bila program ini bergerak 100 persen, maka otomatis akan terbentuk olah data yang memberikan pengaruh signifikan bagi pemerintah daerah. Data tersebut berupa jumlah populasi masyarakat per daerah dengan keterangan kesehatan atau riwayat kesehatan beserta

diagnosisnya.

"Misalnya, data warga KTP Yogyakarta yang tinggal di Jakarta bisa terintegrasi dan mendapat layanan karena pemerintah daerah memiliki akses data yang valid," ujarnya.

Ia menjelaskan, penambahan peserta BPJS mulai bulan Oktober 2017 mencakup berbagai segmen. "Sampai pekerja penerima upah non aktif yang masuk kriteria miskin serta memiliki KTP-el dan atau KK Kota Yogyakarta juga masuk dalam target kami," jelasnya.

Andayani menambahkan, Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) ini nantinya akan semakin dirasakan manfaatnya oleh peserta apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat.

Dikatakan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang program JKN-KIS.

"Bersama-sama kita memberikan sosialisasi, edukasi, informasi, dan advokasi kepada peserta sehingga peserta dapat mendapatkan manfaat JKN-KIS secara optimal," ujarnya. (gll)

Plt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005